

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Stakeholder

Stakeholder theory menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* antara lain pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis dan pihak lain (Ghozali dan Chariri, 2007). Perusahaan dengan penerapan *good corporate governance* yang baik diduga memiliki kemungkinan yang besar untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial lingkungan yang bersifat sukarela sebagai suatu upaya pemenuhan kebutuhan *stakeholder*. Perusahaan dengan kinerja keuangan yang tinggi tentu lebih dikenal oleh masyarakat. Perusahaan harus mampu menjelaskan bagaimana cara perusahaan mendapatkan keuntungan yang tinggi tersebut. Perusahaan memiliki kinerja yang baik, berusaha untuk mengungkapkan informasi lebih (Idah, 2013). Hal ini dalam rangka memenuhi kepentingan seluruh *stakeholder*.

Aktivitas sosial perusahaan seharusnya melampaui tindakan memaksimalkan laba untuk kepentingan pemegang saham (*shareholder*), namun lebih luas lagi bahwa kesejahteraan yang diciptakan oleh perusahaan tidak terbatas kepada kepentingan pemegang saham, tetapi juga untuk kepentingan *stakeholder*, yaitu semua pihak yang mempunyai keterkaitan terhadap perusahaan (Widianto, 2011).

Dalam pengambilan keputusan, para *stakeholder* membutuhkan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan aktivitas yang telah dilakukan. Perusahaan akan berusaha untuk mengungkapkan informasi yang berintegritas, agar *stakeholder* tetap memberi kepercayaan terhadap perusahaan. Menurut sifatnya pengungkapan informasi dibagi menjadi dua, yaitu wajib (*mandatory*) dan sukarela (*voluntary*). Pengungkapan informasi yang bersifat wajib adalah laporan keuangan, informasi ini dibutuhkan oleh para pemangku kepentingan yang mempengaruhi maupun yang dipengaruhi oleh kegiatan ekonomi

perusahaan. Sedangkan pengungkapan yang bersifat sukarela dibutuhkan oleh *stakeholder* yang berpengaruh maupun tidak berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi perusahaan. Laporan sukarela yang sedang berkembang saat ini adalah *sustainability report*. Ghazali dan Chariri (2007), menyatakan bahwa melalui pengungkapan *sustainability report* (pengungkapan sosial dan lingkungan) perusahaan dapat memberikan informasi yang lebih cukup dan lengkap berkaitan dengan kegiatan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan

2.2 Sustainability Report

Sustainability report merupakan model pelaporan informasi korporasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang mengintegrasikan pelaporan keuangan (*financial reporting*) dengan pelaporan sosial (*social reporting*), pelaporan lingkungan (*environment reporting*), dan pelaporan tata kelola korporasi (*corporate governance reporting*) secara terpadu dalam satu paket pelaporan. *Sustainability report* yaitu laporan yang memuat tidak saja informasi kinerja keuangan tetapi juga informasi non keuangan yang terdiri dari informasi aktivitas sosial dan lingkungan yang memungkinkan perusahaan bisa tumbuh secara berkesinambungan (Lako, 2014).

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan dapat dikelompokkan menjadi dua jenis yakni sukarela (*voluntary*) dan wajib (*mandatory*). Pengungkapan wajib adalah informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang (BAPEPAM, IAI, Menteri Keuangan, Pajak dll), peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 /pojk.03/2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.

Sustainability report merupakan laporan publik yang digunakan perusahaan untuk menyediakan kepentingan pemangku internal dan eksternal dengan gambar posisi perusahaan dan kegiatan pada dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan. *Global Reporting Initiative* (GRI) merupakan salah satu lembaga yang serius menangani

permasalahan yang berhubungan dengan *sustainability*. *Sustainability report* yang berdasarkan GRI G4 terdiri dari 3 kategori pengungkapan dan terdapat total 91 item pengungkapan dalam proses pengungkapannya yang meliputi (GRI, 2017):

1. Kategori Ekonomi

Keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya dan dampak terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional dan global. Dalam kategori ekonomi dapat menggambarkan arus modal di antara *stakeholder* yang berbeda dan dampak ekonomi dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Terdapat total 9 item yang di ungkapkan dalam kategori ekonomi dan memiliki 4 aspek yakni: kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tak langsung dan praktik pengadaan.

KATEGORI EKONOMI		
Kinerja Ekonomi	EC1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan.
	EC2	Implikasi finansial dan risiko serta peluang.
	EC3	Cakupan kewajiban organisasi atas program
	EC4	Bantuan financial yang diterima dari.
Keberadaan Pasar	EC5	Rasio upah standar pegawai pemula (entry level) menurut gender dibandingkan dengan upah minimum regional di lokasi-lokasi operasional yang signifikan.
	EC6	Perbandingan manajemen senior yang dipekerjakan dari masyarakat lokal di lokasi operasi yang signifikan.
Dampak Ekonomi Tidak Langsung	EC7	Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur dan jasa yang diberikan.
	EC8	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk besarnya dampak.
Prektik Pengadaan	EC9	Perbandingan dari pembelian pemasok lokal di operasional yang signifikan.

2. Kategori Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori Lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi dan air) dan output (seperti emisi, efluen dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Terdapat total 34 item yang di ungkapkan dalam kategori lingkungan.

KATEGORI LINGKUNGAN		
Bahan	EN1	Bahan yang digunakan berdasarkan berat atau Volume
	EN2	Persentase bahan yang digunakan yang merupakan bahan input daur ulang
Energi	EN3	Konsumsi energi dalam organisasi
	EN4	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN5	Intensitas Energi
	EN6	Pengurangan konsumsi energi
Air	EN7	Konsumsi energi diluar organisasi
	EN8	Total pengambilan air berdasarkan sumber
	EN9	Sumber air yang secara signifikan dipengaruhi oleh pengambilan air
	EN10	Persentase dan total volume air yang didaur ulang dan digunakan kembali
Keanekaragaman Hayati	EN11	Lokasi-lokasi operasional yang dimiliki, disewa, dikelola didalam, atau yang berdekatan dengan, kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar
	EN12	Uraian dampak signifikan kegiatan, produk, dan jasa terhadap keanekaragaman hayati di kawasan lindung dan kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan lindung
	EN13	Habitat yang dilindungi dan dipulihkan

	EN14	Jumlah total spesies dalam iucn red list dan spesies dalam daftar spesies yang dilindungi nasional dengan habitat di tempat yang dipengaruhi operasional, berdasarkan tingkat risiko kepunahan
Emisi	EN15	Emisi gas rumah kaca (GRK) langsung (cakupan 1)
	EN16	Emisi gas rumah kaca (GRK) energi tidak langsung (Cakupan 2)
	EN17	Emisi gas rumah kaca (GRK) tidak langsung lainnya (Cakupan 3)
	EN18	Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN19	Pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK)
	EN20	Emisi bahan perusak ozon (BPO)
	EN21	NOX, SOX, dan emisi udara signifikan lainnya
Efluen dan Limbah	EN22	Total air yang dibuang berdasarkan kualitas dan Tujuan
	EN23	Bobot total limbah berdasarkan jenis dan metode pembuangan
	EN24	Jumlah dan volume total tambahan signifikan
	EN25	Bobot limbah yang dianggap berbahaya menurut ketentuan konvensi basel 2 lampiran I, II, III, dan VIII yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah, dan persentase limbah yang diangkut untuk pengiriman internasional
	EN26	Identitas, ukuran, status lindung, dan nilai keanekaragaman hayati dari badan air dan habitat terkait yang secara signifikan terkait dampak dari pembuangan dan air limpasan dari organisasi
Produk dan Jasa	EN27	Tingkat mitigasi dampak terhadap lingkungan produk dan jasa
	EN28	Persentase produk yang terjual dan kemasannya yang direklamasi menurut kategori
Kepatuhan	EN29	Nilai moneter denda signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas

		ketidakpastian terhadap UU dan peraturan lingkungan
Transportasi	EN30	Dampak lingkungan signifikan dari pengangkutan produk dan barang lain serta bahan untuk operasional organisasi dan pengangkutan tenaga kerja
Lain-lain	EN31	Total pengeluaran dan investasi perlindungan lingkungan berdasarkan jenis
Asesmen pemasok atas lingkungan	EN32	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria lingkungan
	EN33	Dampak lingkungan negatif signifikan aktual dan potensial dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme pengaduan masalah lingkungan	EN 34	Jumlah pengaduan tentang dampak lingkungan yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi

3. Kategori Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Kategori Sosial berisi sub-kategori:

- a. Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja
- b. Hak Asasi Manusia
- c. Masyarakat
- d. Tanggung jawab atas produk

Sebagian besar konten sub-kategori didasarkan pada standar universal yang diakui secara internasional atau referensi internasional lainnya yang relevan. Terdapat total 48 item pengungkapan dalam kategori sosial.

KATEGORI SOSIAL SUB KATEGORI: PRAKTEK KETENAGAKERJAAN DAN KENYAMANAN BEKERJA		
Kepegawaian	LA1	Jumlah total dan tingkat perekrutan karyawan baru dan turnover karyawan menurut kelompok umur, gender, dan wilayah
	LA2	Tunjangan yang diberikan bagi

		karyawan purnawaktu yang tidak diberikan bagi karyawan sementara atau paru waktu, berdasarkan lokasi operasi yang signifikan
	LA3	Tingkat kembali bekerja dan tingkat retensi setelah cuti melahirkan, menurut gender
Hubungan Industrial	LA4	Jangka waktu minimum pemberitahuan mengenai perubahan operasional, termasuk apakah hal tersebut tercantum dalam perjanjian bersama
Kesehatan dan Keselamatan Kerja VV	LA5	Persentase total tenaga kerja yang diwakili dalam komite bersama formal manajemen pekerja yang membantu mengawasi dan memberikan saran program kesehatan dan keselamatan kerja
	LA6	Jenis dan tingkat cedera, penyakit akibat kerja, hari hilang, dan kemangkiran, serta jumlah total kematian akibat kerja, menurut daerah dan gender
	LA7	Pekerja yang sering terkena atau beresiko tinggi terkena penyakit yang terkait dengan pekerjaan mereka
	LA8	Topik kesehatan dan keselamatan yang tercakup dalam perjanjian formal dengan serikat pekerja
Pelatihan dan Pendidikan	LA9	Jam pelatihan rata-rata per tahun per karyawan menurut gender dan menurut kategori karyawan
	LA10	Program untuk manajemen keterampilan dan pembelajaran seumur hidup yang mendukung keberlanjutan kerja karyawan dan membantu mereka mengelola purna bakti
	LA11	Persentase karyawan yang menerima review kinerja dan pengembangan karier secara reguler, menurut gender dan kategori karyawan
Keberagaman dan kesetaraan peluang	LA12	Komposisi badan tata kelola dan pembagian karyawan per kategori karyawan menurut gender, kelompok

		usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan indikator keberagaman lainnya
Kesetaraan Remunerasi Perempuan dan Laki-laki	LA13	Rasio gaji pokok dan remunerasi bagi perempuan terhadap laki-laki menurut kategori karyawan, berdasarkan lokasi operasional yang signifikan
Asesmen Pemasok Terkait Praktik Ketenagakerjaan	LA14	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria praktik ketenagakerjaan
	LA15	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap praktik ketenagakerjaan dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
	LA16	Jumlah pengaduan tentang praktik ketenagakerjaan yang di ajukan, di tangani, dan di selesaikan melalui pengaduan resmi
SUB KATEGORI: HAK ASASI MANUSIA		
Investasi	HR1	Jumlah total dan persentase perjanjian dan kontrak investasi yang signifikan yang menyertakan klausul terkait hak asasi manusia atau penapisan berdasarkan hak asasi manusia
	HR2	Jumlah waktu pelatihan karyawan tentang kebijakan atau prosedur hak asasi manusia terkait dengan aspek hak asasi manusia yang relevan dengan operasi, termasuk persentase karyawan yang dilatih
Non-diskriminasi	HR3	Jumlah total insiden diskriminasi dan tindakan korektif yang diambil
Kebebasan berserikat dan Perjanjian kerja bersama	HR4	Operasi pemasok teridentifikasi yang mungkin melanggar atau beresiko tinggi melanggar hak untuk melaksanakan kebebasan berserikat dan perjanjian kerja sama, dan tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut
Pekerja anak	HR5	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi beresiko tinggi melakukan eksploitasi pekerja anak dan tindakan yang diambil untuk

		berkontribusi dalam penghapusan pekerja anak yang efektif
Pekerja paksa atau Wajib kerja	HR6	Operasi dan pemasok yang diidentifikasi berisiko tinggi melakukan pekerja paksa atau wajib kerja dan tindakan untuk berkontribusi dalam penghapusan segala bentuk pekerja paksa atau wajib kerja
Praktik keamanan	HR7	Persentase petugas pengamanan yang dilatih dalam kebijakan atau prosedur hak asasi manusia diorganisasi yang relevan dengan operasi
Hak adat	HR8	Jumlah total insiden pelanggaran yang melibatkan hak-hak masyarakat adat dan tindakan yang diambil
Asesmen	HR9	Jumlah total dan persentase operasi yang telah melakukan review atau asesmen dampak hak asasi manusia
Asesmen pemasok atas hak asasi manusia	HR10	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria hak asasi manusia
	HR11	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap hak asasi manusia dalam rantai pemasok dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Masalah Hak Asasi Manusia	HR12	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap hak asasi manusia yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan formal
SUB KATEGORI: MASYARAKAT		
Masyarakat lokal	SO1	Persentase operasi dengan pelibatan masyarakat lokal, asesmen dampak, dan program pengembangan yang diterapkan
	SO2	Operasi dengan dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat lokal
Anti korupsi	SO3	Jumlah total dan persentase operasi yang dinilai terhadap risiko terkait dengan korupsi dan risiko signifikan yang teridentifikasi
	SO4	Komunikasi dan pelatihan mengenai kebijakan dan prosedur anti-korupsi

	SO5	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil
Kebijakan publik	SO6	Nilai total kontribusi politik berdasarkan negara dan penerima atau penerima manfaat
Anti persaingan	SO7	Jumlah total tindakan hukum terkait Anti Persaingan, anti-trust, serta praktik monopoli dan hasilnya
Kepatuhan	SO8	Nilai moneter denda yang signifikan dan jumlah total sanksi non-moneter atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang
Asesmen Pemasok Atas Dampak Terhadap Masyarakat	SO9	Persentase penapisan pemasok baru menggunakan kriteria untuk dampak terhadap masyarakat
	SO10	Dampak negatif aktual dan potensial yang signifikan terhadap masyarakat dalam rantai pasokan dan tindakan yang diambil
Mekanisme Pengaduan Dampak Terhadap Masyarakat	SO11	Jumlah pengaduan tentang dampak terhadap masyarakat yang diajukan, ditangani, dan diselesaikan melalui mekanisme pengaduan resmi
SUB KATEGORI: TANGGUNG JAWAB PRODUK		
Kesehatan keselamatan pelanggan	PR1	Persentase kategori produk dan jasa yang signifikan dampaknya terhadap kesehatan dan keselamatan yang dinilai untuk peningkatan
	PR2	Total jumlah insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dampak kesehatan dan keselamatan dari produk dan jasa sepanjang daur hidup, menurut jenis
Pelabelan Produk dan Jasa	PR3	Jenis informasi produk dan jasa yang diharuskan oleh prosedur organisasi terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, serta persentase kategori produk dan jasa yang signifikan harus mengikuti persyaratan informasi sejenis
	PR4	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela terkait dengan informasi dan pelabelan produk dan jasa, menurut jenis hasil
	PR5	Hasil survei untuk mengukur

		kepuasan pelanggan
Komunikasi pemasaran	PR6	Penjualan produk yang dilarang atau disengketakan
	PR7	Jumlah total Insiden ketidakpatuhan terhadap peraturan dan koda sukarela tentang komunikasi pemasaran, termasuk iklan, promosi, dan sponsor, menurut jenis hasil
Privasi pelanggan	PR8	Jumlah total keluhan yang terbukti terkait dengan pelanggaran privasi pelanggan dan hilangnya data pelanggan
Kepatuhan	PR9	Nilai moneter denda yang signifikan atas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan terkait

2.2.1 Manfaat *Sustainability Report*

Menurut *World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* dalam Adhipradana (2014) manfaat yang didapat dari *sustainability report* adalah:

1. *Sustainability report* memberikan informasi kepada *stakeholder* (pemegang saham, anggota komunitas lokal, pemerintah) dan meningkatkan prospek perusahaan, serta membantu mewujudkan transparansi.
2. *Sustainability report* dapat membantu membangun reputasi sebagai alat yang memberikan kontribusi untuk meningkatkan *brand value*, *market share*, dan loyalitas konsumen jangka panjang.
3. *Sustainability report* dapat menjadi cerminan bagaimana perusahaan mengelola risikonya.
4. *Sustainability report* dapat digunakan sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung dengan semangat kompetisi.
5. *Sustainability report* dapat mengembangkan dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial.
6. *Sustainability report* cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang.

7. *Sustainability report* membantu membangun ketertarikan para pemegang saham dengan visi jangka panjang dan membantu mendemonstrasikan bagaimana meningkatkan nilai perusahaan yang terkait dengan isu sosial dan lingkungan.

2.2.2 Tujuan Pembuatan *Sustainability Report*

Idah (2013), pembuatan dan penyebaran *sustainability report* (Laporan Keberlanjutan) memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan reputasi terkait dengan transparansi dan akuntabilitas.
2. Menjangkau berbagai pemangku kepentingan, agar mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, sehingga perlu disebarluaskan melalui berbagai cara (internet, media cetak, *stakeholder convening*, dan sebagainya).
3. Membantu perusahaan untuk mengambil keputusan manajemen dalam memperbaiki kinerja pada indikator yang masih lemah.
4. Membantu investor untuk mengetahui kinerja perusahaan secara lebih menyeluruh.

2.3 Profitabilitas

Profitabilitas merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka *stakeholder* akan mendapatkan informasi yang semakin rinci dari yang disampaikan oleh manajer, hal ini berguna untuk meyakinkan *stakeholder* perusahaan. Beberapa penelitian mengungkapkan adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Jati (dalam Suryono dan Prastiwi, 2011) menyatakan bahwa profitabilitas merupakan kebebasan dan fleksibilitas yang diberikan kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan tanggung jawab sosial secara luas kepada para pemegang saham, sehingga semakin tinggi tingkat profitabilitas maka akan semakin tinggi pula luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi pada perusahaan akan meningkatkan daya saing antar perusahaan. Perusahaan yang mempunyai *profit* tinggi, cenderung akan membuka cabang atau

lini baru sehingga dapat memperbesar keuntungan investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya.

2.3.1 Tujuan Penggunaan Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2012):

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

2.3.2 Manfaat Penggunaan Profitabilitas

Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2012) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

3.3.3 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Profitabilitas atau yang disebut rasio rentabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan, dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya (Harahap, 2016).

a. *Margin Laba (Profit Margin)*

Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan dalam mendapatkan laba yang cukup tinggi. Rasio ini merupakan perbandingan antara pendapatan bersih dengan penjualan.

b. *Return on Aset*

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan, semakin besar rasio ini semakin baik. Rasio ini merupakan perbandingan antara penjualan bersih dengan total aset. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba.

c. *Return on Equity*

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik, semakin besar semakin bagus. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap rata-rata modal.

d. *Basic Earning Power*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba diukur dari jumlah laba sebelum dikurangi bunga dan pajak dibandingkan dengan total aktiva. Semakin besar rasio semakin baik.

e. *Earning per Share*

Rasio ini menunjukkan berapa besar kemampuan per lembar saham menghasilkan laba. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bagian saham bersangkutan dengan jumlah saham.

f. *Contribution Margin*

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang menutupi biaya-biaya tetap atau biaya operasi lainnya. Dengan pengetahuan atas rasio ini kita dapat mengontrol pengeluaran untuk biaya tetap atau biaya operasi

sehingga perusahaan dapat menikmati laba. Dimana rasio ini merupakan perbandingan laba kotor dengan penjualan.

Dari semua rasio profitabilitas, penulis hanya akan menggunakan rasio *Return On Asset (ROA)*, karena mengacu pada profitabilitas (*profitability*) dan efisiensi operasional (*operational efficiency*). ROA sering digunakan untuk membandingkan performa bisnis dibandingkan kompetitor dan industri sejenis.

2.4 Leverage

Leverage juga disebut juga dengan rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya (Hanafi dan Halim, 2016). Perusahaan mempunyai tingkat *leverage* yang tinggi berarti sangat tergantung pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan dengan tingkat *leverage* yang rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri (Jannah dan Kurnia, 2016). Tingkat *leverage* yang tinggi menandakan bahwa perusahaan mempunyai proporsi hutang yang besar. Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap modal maupun aset, rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal (Harahap, 2016).

Tinggi rendahnya tingkat *leverage* akan mempengaruhi pengungkapan. Perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi akan menanggung monitoring cost yang tinggi juga (Jensen dan Meckling, 1976). Hal ini dapat mempengaruhi manajemen perusahaan untuk melaporkan tingkat profitabilitas yang tinggi dengan mengurangi biaya-biaya termasuk biaya untuk mengungkapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Leverage merupakan sebuah rasio yang mengukur sejauh mana perusahaan mendanai perusahaannya dengan hutang. *leverage* ini dapat mempengaruhi pengungkapan informasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan karena pada saat

tingkat *leverage* perusahaan itu tinggi, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengurangan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Maka dari itu, tingkat *leverage* sebuah perusahaan dapat mempengaruhi penentuan keputusan untuk melakukan pengungkapan sebuah informasi tambahan seperti pembuatan *sustainability report*.

2.4.1 Tujuan Penggunaan *Leverage*

Berikut ini ada beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* menurut Kasmir (2012:153), yakni:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki.

2.4.2 Manfaat Penggunaan *Leverage*

Manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* menurut Kasmir (2012:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri.

2.4.3 Jenis- jenis Rasio *Leverage*

1. Debt Equity Ratio

Rasio ini menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang terhadap modal.

2. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Rasio modal dengan aktiva tertimbang menurut resiko (ATMR) ini berlaku di bank, rasio ini menunjukkan sejauh mana modal pemilik saham dapat menutupi aktiva berisiko. Rasio ini merupakan perbandingan antara *Stockholder equity* terhadap *Total Risk Weighd Asset (ATMR)*.

3. Capital Formation

Rasio ini mengukur tingkat pertumbuhan suatu perusahaan (khususnya usaha bank) sehingga dapat bertahan tanpa merusak *Capital Adequacy Ratio*. Rasio ini merupakan perbandingan antara laba bersih dividen yang dibayar terhadap rata-rata modal pemilik.

2.5 Ukuran Perusahaan

Khafid dan Mulyaningsih (2012), menyebutkan bahwa semakin besar suatu perusahaan, memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan informasi lebih banyak. Perusahaan dengan aset yang besar banyak mendapat sorotan publik. Maka dari itu, perusahaan yang besar cenderung lebih banyak mengeluarkan biaya

untuk mengungkapkan informasi yang lebih luas sebagai upaya untuk menjaga legitimasi perusahaan (Natalia dan Wahidahwati, 2016).

Ukuran perusahaan merupakan sebuah pengukuran tentang seberapa besar sebuah perusahaan. Perusahaan yang besar umumnya memiliki jumlah aktiva yang besar. Sari (2011) dalam Nasir *et.al* (2014) menyatakan bahwa perusahaan besar mampu melakukan pengungkapan lebih luas karena perusahaan besar mempunyai sumber daya yang lebih besar dan mampu membiayai penyediaan informasi kepada pihak eksternal. Selain itu, aktivitas perusahaan yang masuk kedalam kategori perusahaan besar tentu akan lebih banyak jika dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Maka perusahaan tentu merasa perlu untuk melakukan pengungkapan yang lebih luas dan menginformasikan informasi tambahan yang tidak terdapat dalam laporan keuangan, seperti informasi tentang lingkungan dan sosial.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan dalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam Undang-Undang No.20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Aset (tidak termasuk tanah & bangunan tempat usaha)
Usaha Mikro	Maksimal 50.000.000
Usaha Kecil	>50.000.000 - 500.000.000
Usaha Menengah	>500.000.000 - 10.000.000.000
Usaha Besar	>10.000.000.000

Sumber: Undang-undang no 20 tahun 2008

2.6 Dewan Komisaris Independen

Menurut Mulyadi (2002) dewan komisaris adalah wakil *shareholder* dalam perusahaan yang berbadan hukum perseroan terbatas yang berfungsi mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (direksi) dan bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian intern perusahaan. Menurut peraturan otoritas jasa keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Karena fungsi dewan komisaris yang sangat penting dalam memonitor perusahaan, maka harus ditentukan bahwa anggota dewan komisaris tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan atau independen. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kecurangan dalam pengawasan terhadap kinerja perusahaan demi kelangsungan perusahaan tersebut.

Dalam POJK No 33/POJK.04/2014 bagian kesatu pasal 20 ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa:

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
2. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, 1 (satu) diantaranya adalah komisaris independen.
3. Dalam hal dewan komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris, jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.
4. 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris.

pada pasal 21 ayat 2 (dua), Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai komisaris independen emiten atau perusahaan publik pada periode berikutnya;
2. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik tersebut;
3. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
4. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.

2.7 Firm Age

Umur perusahaan mengindikasikan berapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Semakin lama perusahaan maka semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut (Sri dan Sawitri, 2011). Umur perusahaan menunjukkan lamanya eksistensi dan kemampuan bersaing perusahaan. Semakin lama perusahaan maka cenderung meningkatkan kualitas praktek pelaporan keuangan dari waktu ke waktu (Al saeed, 2006).

Perusahaan yang lebih lama memungkinkan dapat meningkatkan praktek pelaporan laporan keberlanjutan seiring dengan berjalanya waktu (Bhatia dan Tuli, 2017). Perusahaan yang lebih lama berdiri biasanya memiliki manajemen yang baik untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan. Manajemen perusahaan akan meningkatkan kualitas informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang lengkap dengan biaya yang rendah dibanding dengan perusahaan yang lebih muda usianya (Bhatia dan Tuli 2017).

2.8 Penelitian Terdahulu

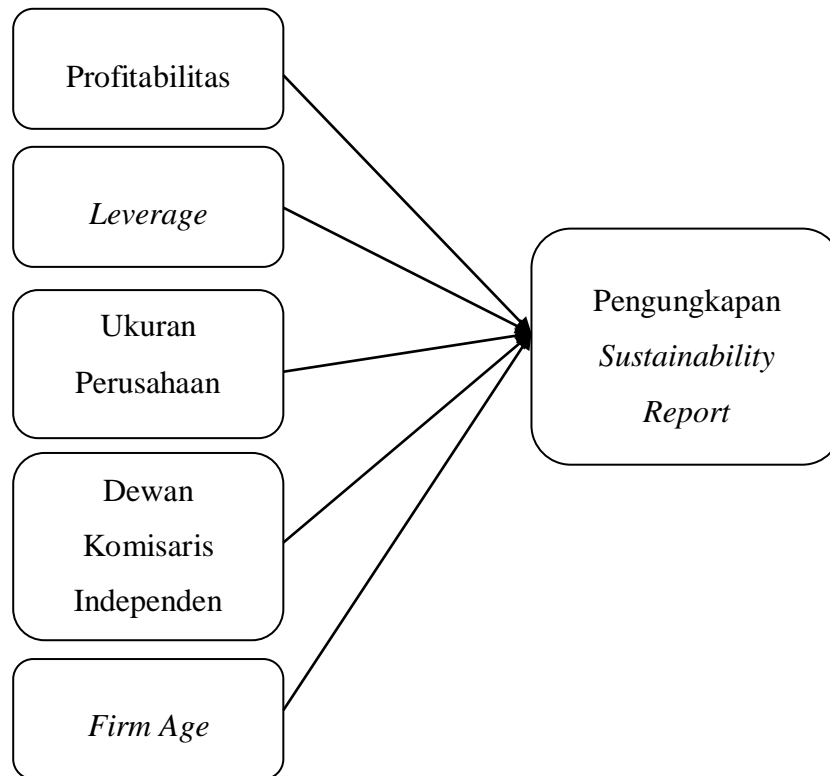
Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Siska Liana, Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Sustainability Report (pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015), 2019	<i>Sustainability Report</i> , Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Dewan Komisaris Independen	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Sedangkan ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report
2.	Andika Fatchurochman, pengaruh <i>firm size</i> , <i>firm age</i> , <i>profitability</i> , <i>liquidity</i> , dan <i>leverage</i> terhadap pengungkapan sustainability report (pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2014-2016), 2019	<i>Sustainability report</i> , <i>firm size</i> , <i>firm age</i> , <i>profitability</i> , <i>liquidity</i> , <i>leverage</i> .	Ukuran perusahaan dan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report. Namun Umur perusahaan, Likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan sustainability report.
3.	Annisa Fauziah Afifulhaq, Pengaruh profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas perusahaan, dan corporate governance	pengungkapan sustainability reporting, profitabilitas, leverage, likuiditas, aktivitas perusahaan,	Rasio Profitabilitas (ROA) dan Jumlah Rapat Dewan Direksi (DD) berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan sustainability reporting, sedangkan Rasio Leverage (DER), Rasio Likuiditas (CR), Rasio Aktivitas (IT), dan Jumlah

	terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> (studi empiris pada perusahaan BUMN non perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015), 2018.	komite audit, dewan direksi.	Rapat Komite Audit (KA) tidak berpengaruh terhadap praktik pengungkapan <i>sustainability reporting</i> .
4.	Ahmad Rifandi, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas Dan Leverage Terhadap Pengungkapan <i>Sustainability Report</i> (Studi Empiris Pada Perusahaan-Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei Periode 2013-2015), 2017.	<i>Sustainability reporting</i> , Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, <i>Leverage</i>	a. Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015 b. Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015 c. Leverage tidak berpengaruh signifikan negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability reporting</i> pada perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2013-2015.
5.	Ria Aniktia, Muhammad Khafid, Pengaruh mekanisme <i>good corporate governance</i> dan kinerja keuangan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> (pada perusahaan terdaftar di BEI periode 2013), 2015.	<i>Sustainability report</i> , komisaris independen, komite audit. Kepemilikan manajerial, <i>governance committee</i> , profitabilitas, dan <i>leverage</i> .	variabel komite audit, <i>governance committee</i> dan <i>leverage</i> berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> sementara variabel dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> .

2.9 Kerangka Pemikiran

Dalam pengembangan hipotesis dalam penelitian ini menggambarkan kerangka-kerangka konsep seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*

Profitabilitas merupakan suatu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Semakin tinggi profitabilitas, maka semakin banyak informasi yang didapatkan oleh para *stakeholder* tujuannya adalah untuk meyakinkan *stakeholder* perusahaan (Hitchner, 2017:1282). Terkait adanya hubungan antara profitabilitas dengan pengukuran tanggung jawab sosial terdapat beberapa penelitian yang

menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian Suryono dan Prastiwi (2011) menemukan hubungan positif antara profitabilitas dengan inisiatif manajer dalam mengungkapkan *sustainability report*. Penelitian yang dilakukan oleh Kafid dan Mulyaningsih (2015), Jannah dan Kurnia (2016) dan Sari (2013) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Profitabilitas adalah faktor yang memberikan kebebasan dan fleksibilitas kepada manajemen untuk melakukan dan mengungkapkan program tanggung jawab sosial secara luas. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pula pengungkapan informasi sosial (Munif, 2010).

H1 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara profitabilitas terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.10.2 Pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Rasio *leverage* mengukur paparan resiko dari kreditor suatu bisnis dengan pemegang saham (Hitchner, 2017:1281). Semakin tinggi tingkat *leverage* perusahaan, semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya kepada kreditor. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aniktia dan Khafid (2015), menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi rasio utang perusahaan. Untuk menarik para *stakeholder* menginvestasikan dana pada suatu perusahaan yang kondisi laporan keuangannya sehat, perusahaan yang memiliki tingkat *leverage* yang tinggi, menganggap perlu memberikan laporan tanggung jawab sosial, sehingga ada “*good news*” tentang kinerja perusahaan.

H2 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *leverage* terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.10.3 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan (Hitchner, 2017). Penelitian Idah (2013) dan penelitian Adhipradana (2014) menyatakan, ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan *sustainability report*. Total aset yang besar, dinilai menandakan perusahaan memiliki daya yang lebih besar untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengungkapan *sustainability report* yang berisi pengungkapan sosial dan lingkungan. Perusahaan dengan ukuran yang besar lebih banyak mendapat sorotan dari publik dan dianggap mempunyai sumberdaya yang cukup untuk melakukan laporan keberlanjutan. Perusahaan besar juga menghadapi tekanan dari berbagai pemangku kepentingan yang juga lebih besar sehingga dinilai akan mengungkapkan informasi yang lebih banyak. Semakin besar perusahaan diharapkan kualitas *sustainability report* yang diungkapkan semakin baik.

H3 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.10.4 Pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*

Komisaris independen adalah pihak yang independen dan tidak memiliki hubungan relasi bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris, serta dengan perusahaan itu sendiri (KNKG, 2006). Perusahaan akan mengungkapkan informasi seluas-luasnya seperti pengungkapan *sustainability report*, untuk mendapatkan pengendalian intern yang baik maka diperlukan peranan dewan komisaris independen dalam mengembangkan dan melaksanakannya. Keberadaan dewan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan *good corporate governance* akan mendorong kemungkinan perusahaan melakukan pengungkapan lebih untuk para *stakeholdernya*, salah satunya pengungkapan *sustainability report*. Penelitian Sari dan Marsono (2013) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen

berpengaruh terhadap *sustainability*. Menurut Putri (2013), semakin besar persentase komisaris independen maka akan meningkatkan kualitas pengungkapan *sustainability report* dengan aktivitas pengawasan yang dilakukan.

H4 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.10.5 Pengaruh *firm age* terhadap pengungkapan *sustainability report*

Umur perusahaan mengindikasikan berapa lama perusahaan tersebut berdiri dan beroperasi. Semakin lama perusahaan maka semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut (Sri dan Sawitri, 2011). Berdasarkan penelitian tersebut semakin lama perusahaan berdiri, maka perusahaan dapat melakukan pengungkapan tanggungjawab yang lebih luas dibanding perusahaan yang baru. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Bhatia dan Tuli (2017), menyatakan bahwa *firm age* berpengaruh terhadap pengungkapan *sustainability report*. Perusahaan yang lebih lama memungkinkan dapat meningkatkan praktek pelaporan laporan keberlanjutan seiring dengan berjalanya waktu. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut perusahaan dengan umur lama maka perusahaan akan memiliki manajemen yang baik untuk mengungkapkan laporan keberlanjutan perusahaan.

H5 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara *firm age* terhadap pengungkapan *sustainability report*.